



**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM DAN PENDAPATAN ASLI  
DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH KABUPATEN/  
KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

**DINDA LIANI BR TARIGAN**  
NPM. 1515100282

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2020**



FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : DINDA LIANI BR TARIGAN  
NPM : 1515100282  
PROGRAM STUDI : S1 ( STRATA SATU )  
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH DANA ALOKASI  
UMUM DAN PENDAPATAN ASLI  
DAERAH TERHADAP BELANJA  
DAERAH KABUPATEN/KOTA DI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

MEDAN, JULI 2020

KETUA PROGRAM STUDI

( Junawan, S.E., M.Si )

PEMBIMBING I

(Fitri Yani Panggabean, S.E., M.Si)

DEKAN



( Dr. Surya Nita, S.E., M.Hum )

PEMBIMBING II

(Rusyda Nazhira Yunus, S.S., M.Si)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN**

SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH  
PANITIA UJIAN SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

**PERSETUJUAN UJIAN**

NAMA : DINDA LIANI BR TARIGAN  
NPM : 1515100282  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
JENJANG : S1 ( STRATA SATU )  
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH DANA ALOKASI UMUM  
DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
TERHADAP BELANJA DAERAH  
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI  
SUMATERA UTARA

MEDAN, JULI 2020

ANGGOTA I

(Fitri Yani Panggabean, S.E.,M.Si)

ANGGOTA III

(Aulia, S.E.,MM)



KETUA

(Junawan, S.E., M.Si)

ANGGOTA II

(Rusyda Nazhira Yunus, S.S.,M.Si)

ANGGOTA IV

(Hernawaty, S.E.,MM)

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DINDA LIANI BR TARIGAN  
NPM : 1515100282  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : PENGARUH DANA ALOKASI UMUM DAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP  
BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA DI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Oktober 2019



(DINDA LIANI BR TARIGAN)



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DINDA LIANI BR TARIGAN  
Tempat/Tanggal Lahir : Mejuah-juah, 26 Maret 1997  
NPM : 1515100282  
Fakultas : Sosial Sains  
Program Studi : Akuntansi  
Alamat : Mejuah-Juah, Kec. Kuala, Kab. Langkat

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi. Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang. Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, November 2019



Yang membuat pernyataan

  
DINDA LIANI BR TARIGAN



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

## FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jln. Jend. Gatot Subroto Km.4,5 PO.BOX.1099 Telp. (061) 8455571 Medan  
 Email : fasosa@pancabudi.ac.id http://www.pancabudi.ac.id

### BERITA ACARA PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Pada hari ini, Singgaperbangsa Tanggal, 23 Bulan, Desember Tahun, 2019, telah dilaksanakan Ujian Meja Hijau Pada Program Studi Akuntansi Semester II Tahun Akademik 2019 bagi mahasiswa/i atas nama :

Nama : Dinda Liari br Tarigan  
 Npm : 1615100202  
 Program Studi : Akuntansi  
 Tanggal Ujian : 23 Desember 2019  
 Judul Skripsi Lama : Analisis Belanja modal, Dana Alokasi Khusus Dan pertumbuhan ekonomi ditinjau dari pertumbuhan daerah no. 9 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah kabupaten Simalungun  
 Judul Skripsi Baru : Pengaruh Dana Alokasi umum Dan Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja daerah kabupaten/kota Di provinsi Sumatera Utara

Dinyatakan benar bahwa dalam pelaksanaan ujian Meja Hijau mahasiswa tersebut diatas telah terjadi perubahan judul skripsi yang telah dikendaki oleh Panitia Ujian Meja Hijau.

JABATAN	NAMA DOSEN	TANDA TANGAN
Ketua Penguji/ Ketua Program Studi	<u>Junawan SE, M.Si</u>	
Anggota I/ Pembimbing I	<u>Fitri Yani Panggabean SE, M.Si</u>	
Anggota II/ Pembimbing II	<u>Rusya Nazkha Yunus SS, M.Si</u>	
Anggota III/ Penguji I	<u>Aulia SE, M.M</u>	
Anggota IV/ Penguji II	<u>Hornawaty SE, M.M</u>	



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

## FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4.5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

(TERAKREDITASI)

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

(TERAKREDITASI)

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

(TERAKREDITASI)

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

(TERAKREDITASI)

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)

### PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR\*

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: DINDA LIANI BR TARIGAN
Tgl. Lahir	: Mejuang juah / 26 Maret 1997
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1515100282
Bidang Studi	: Akuntansi
Spesialisasi	: Akuntansi Sektor Publik
Kredit yang telah dicapai	: 140 SKS, IPK 3.18
No. Hp	: 082272313754
Saya mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut	:

#### Judul

Analisis Belanja Modal Dana Alokasi Khusus Dengan Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten Simalungun

Disetujui Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Tanda Tangan Tidak Perlu

( Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D. )

Medan, 06 Maret 2019  
 Pemohon,  
  
 ( Dinda Liani Br Tarigan )

Tanggal : .....  
 Disahkan oleh :  
 Dekan  
  
 ( Dr. Surya Nita, S.E., M.Hum. )

Tanggal : 05/03/2019  
 Disetujui oleh :  
 Dosen Pembimbing I :  
  
 ( Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si )

Tanggal : .....  
 Disetujui oleh :  
 Ka. Prodi Akuntansi  
  
 ( Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si )

Tanggal : 05/03/2019  
 Disetujui oleh :  
 Dosen Pembimbing II :  
  
 ( RUSYDA NAZHIRAH YUNUS, SS., M.SI )

Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018






UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Dosen Pembimbing I : Ehri Yani Panggabean SE,MSI  
 Dosen Pembimbing II : RUSYDA ALAZHIRAH YUNUS  
 Nama Mahasiswa : DINDA LIANI BR TARIGAN  
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100282  
 Bidang Pendidikan : Satara (satu)  
 Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus dan Pelaksanaan Ekadomi di Tingkat Dan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2012 tentang Jabang Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Singgih

ANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
109 12/08/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cover</li> <li>- Abstrak</li> <li>- Kata pengantar</li> <li>- Muklahi publik</li> <li>- Jemi Subroto paha</li> <li>- Bab II</li> <li>- rangkai Peralat</li> <li>- Penalaran</li> <li>- Petrueli</li> <li>- Daftar pustaka</li> </ul>		

Medan, 08 Agustus 2019  
 Diketahui/Ditetujui oleh :  
 Dekan,



Dr. Salya Lita S.H., M.Hum.







UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Dosen Pembimbing I : Fitri Yani Panggabean, SE,MSI  
 Dosen Pembimbing II : RUSYDA NAZHIRAH YUNUS,SS,MSI  
 Nama Mahasiswa : DINDA LIANI BR TARIGAN  
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100282  
 Bidang Pendidikan : ST (STARA satu)  
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : ANALISIS Balanga modal Dan Dana Alokasi Khusus  
 pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten simalungun

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
1 Mei 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kata pengantar</li> <li>- Daftar tabel</li> <li>- kerangka pemikiran (teori)</li> <li>- Operasionalisasi variabel</li> <li>Brat metode penul.</li> <li>- Referensi (jurnal)</li> <li>- Daftar pustaka</li> <li>- Tjara penulisan (Perangkat Teori, metode dan jurnal)</li> </ul>		
	<p>Ace Seminar proposal</p>  <p>20/05/2019 DPI</p>		

Medan, 13 Mei 2019

Diketahui/Disetujui oleh :  
 Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Dosen Pembimbing I : Fitri Yani Panggabean, SE, Msi  
 Dosen Pembimbing II : RUSYDA MAZHIRAH YERUS, SS, Msi  
 Nama Mahasiswa : DINDA LIANI BR TARIGAN  
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100282  
 Bidang Pendidikan : SI (S1) (S1) (S1)  
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Belanja Modal Dan Dana Alokasi Khusus  
 Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten Simalungun

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
13 Mei 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kata leangngun hnyf leid . An dan , atau dari , jila masuk dalam kalimat .</li> <li>- Kata Pengantar</li> <li>- Jarak Jang jauh sedidi antar sub-bab</li> <li>- Manfaat Penelitian</li> <li>- Daftar Pustaka</li> </ul>	3Ranf	
13 Mei 2019	Acc Proposal	3Ranf	

Medan, 13 Mei 2019  
 Diketahui/Disetujui oleh :  
 Dekan,





Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,8 Telp (061) 8455571  
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpad@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Dosen Pembimbing I : Fitri Yuni Panggabean, S.E., M.Si  
 Dosen Pembimbing II : Rusya Nazirah Yunus, S.Si, M.Si  
 Nama Mahasiswa : DINDA LIANI BR TARIGAN  
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100282  
 Jenjang Pendidikan : Pengaruh Dana Alokasi - kawasan stana (1)  
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap balanja Daerah kabupaten/kota di Sumatera utara

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
26/10-2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar pustaka.</li> <li>- Rumusan masalah.</li> <li>- Teori Tinjauan pustaka dan tambahan update.</li> <li>- Indikator variabel.</li> </ul>		
	<p>Ace sidang Skripsi</p> <p> 09/11-2019            (Ace Bersyarat)</p>		

Medan, 26 Oktober 2019  
 Diketahui/Disetujui oleh :  
 Dekan,







Telah Diperiksa oleh LPMU dengan Plagiarisme 59.9%

Medan, 27 November 2019

Ka. LPMU

*Handwritten signature: Cahyo Pramono*

Cahyo Pramono, SE, MM

FM-BPAA-2012-041

Medan, 27 November 2019  
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan  
Fakultas SOSIAL SAINS  
UNPAB Medan  
Di -  
Tempat

Telah di terima  
berkas persyaratan  
dapat di proses  
Medan, 29/11/2019  
Ka. BPAA  
an. *Alucif*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DINDA LIANI BR TARIGAN  
Tempat/Tgl. Lahir : Mejuang - Juah / 26 Maret 1997  
Nama Orang Tua : NDIRIKEN TARIGAN  
N. P. M : 1515100282  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Program Studi : Akuntansi  
No. HP : 082272313754  
Alamat : Mejuang - Juah

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya saya menyatakan :

- Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- Telah tercap keterangan bebas pustaka
- Tersampir surat keterangan bebas laboratorium
- Tersampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- Tersampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- Tersampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiplakan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangi dosen pembimbing, prodi dan dekan
- Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- Tersampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berlis di masukan ke dalam MAP
- Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	0
<b>Total Biaya</b>	<b>: Rp.</b>	<b>2,100,000</b>
	<b>Rp</b>	<b>2.100.000</b>

29/11/2019 *(Handwritten signature)*

5. UK 50%  
(dan 3 tahun)

Rp. 4.725.000 Periode Wisuda Ke : **64**

Ukuran Toga : **M**

Diketahui/disetujui oleh :

Dr. Surya Mita S.H., M.Hum.  
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya

*(Handwritten signature: Dinda Liani Br Tarigan)*  
DINDA LIANI BR TARIGAN  
1515100282

Uraian :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
  - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
  - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Wts.ybs.

**TANDA BEBAS PUSTAKA**  
No. 1258/PERP/BP/2019  
Dinyatakan tidak ada sangkut  
P.T. Perpustakaan  
27 NOV 2019  
Perpustakaan  
*(Handwritten signature: Nanda Khairidah S.I.P)*





ACC jltip lux  
3Rmm 30/07  
2020

Ace jltip lux  
Ljltip 28/07  
2020



**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM DAN PENDAPATAN  
ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH  
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI  
SUATERA UTARA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

**DINDA LIANI BR TARIGAN  
NPM.1515100282**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2020**

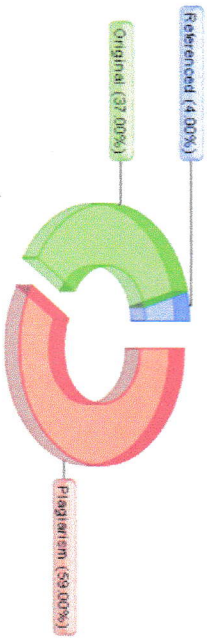
### Plagiarism Detector v. 1281 - Originality Report

Analyzed document: 19/11/2019 10:51:28

# "DINDA LIANI BR TARIGAN\_1515100282\_AKUNTANSI.docx"

Book Type: Internet - via Google and Bing  
Proposed by Universitas Pembangunan Panca Budi\_Licensee2

Relation chart:



Distribution graph:



Comparison Preseel Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

- 104 wrds: 100.47% [https://ejournal.undip.ac.id/22587/1/SKRIPSI...\\_NUR\\_NIDAH\\_BAHMAMATI.PDF](https://ejournal.undip.ac.id/22587/1/SKRIPSI..._NUR_NIDAH_BAHMAMATI.PDF)
- 88 wrds: 88.62% <https://id.123dok.com/document/7q88jy6-pengaruh-dana-dilekasi-kursus-bidang-perid...>
- 60 wrds: 59.41% <https://id.123dok.com/document/7f157vq-pengaruh-pendidapan-asi-dicairn-pada-dena...>



## **ABSTRAK**

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap Belanja Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2016. Sumberdata dalam penelitian ini melalui studi pustaka dan dokumentasi melalui website [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif bersifat asosiatif. Data penelitian ini adalah data Skunder.teknik pengumpulan sampel pada penelitian ini adalah sampel acak sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Asli Daerah secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

Kata kunci : Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Daerah

## ABSTRACT

---

*This study aims to determine whether the General Allocation Fund, and Regional Original Income partially and simultaneously influence Regional Expenditures in the District / City Governments in North Sumatra Province in 2014-2016. Sources of data in this study through literature study and documentation through the website [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id). This research uses quantitative methods that are associative. The data of this study are secondary data. The sample collection technique in this study is the saturation simple random sample. The results of this study indicate that the General Allocation Funds, and Regional Original Revenues partially and simultan eously have a significant effect on the Regional Spending of Regency / City Governments in North Sumatra Province.*

*Keywords : General Allocation Funds, Regional Original Revenues, an Expenditures Area*

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkat dan pertolongan-Nya senantiasa menyertai penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : “Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara”, yang diajukan sebagai bahan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Dalam pengerjaan dan penyelesaian skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dalam bentuk bimbingan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M selaku rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Junawan, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu Fitri Yani Panggabean, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.



5. Ibu Rusyda Nazhirah Yunus , S.S., M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan mengenai ketentuan penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan rapi dan sistematis.
6. Yang tercinta kepada Alm ayah saya semoga apa yang saya capai bisa membuat ayah di surga bangga, dan untuk mama terimakasih ma selalu memberi semangat disaat saya mulai mengeluh terimakasih juga untuk keluarga dan sahabat saya yang selalu memberi semangat kepada saya.
7. Seluruh sahabat-sahabat terdekat saya dan teman-teman seperjuangan stambuk 2015 kelas Akuntansi Siang B yang telah banyak memberikan motivasi dan semangat menyelesaikan skripsi ini.
8. Buat orang-orang yang selalu bertanya kapan wisuda terimakasih atas ucapan kalian karna itu salah satu motivasi ku untuk cepat menyelesaikan skripsi ini,dan jika nanti skripsi ini sudah selesai jangan bertanya, udah kerja,kapan nikah, percaya lah itu pertanyaan yang sama sekali tidak lucu.

Medan, Desember 2019  
Penulis

Dinda Liani Br Tarigan  
15151100282

# DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
C. Perumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian .....	7
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori .....	9
1. Dana Alokasi Umum .....	9
2. Pendapatan Asli Daerah.....	13
3. Belanja Daerah .....	20
4. Pembiayaan Daerah .....	35
B. Penelitian Sebelumnya .....	25
C. Kerangka Pemikiran .....	29
<b>BAB III    METODELOGI PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Penelitian.....	30
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	30
C. Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data.....	31
D. Definisi Operasional .....	32
E. Teknik Analisis Data .....	33
F. Teknik Analisis Data .....	34
1. Statistik Deskriptif.....	34
2. Uji Asumsi Klasik .....	34
a. Uji Normalitas .....	34
b. Uji Multikolinearitas.....	35
c. Uji Heteroskedasitas .....	35
d. Uji Auto Korelasi.....	36
3. Analisis Regresi Linear .....	37
4. Uji Kesesuaian .....	38
a. Uji Parsial (Uji t) .....	38

b. Uji Simulan (Uji F).....	39
c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	39

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian.....	40
1. Sejarah Penelitian Sumatera Utara .....	40
2. Deskripsi Variabel .....	41
3. Statistik Deskriptif.....	43
4. Pengujian Asumsi Klasik.....	43
a. Uji Normalitas Data.....	43
b. Uji Multikolinearitas.....	45
c. Uji Heteroskedastisitas .....	46
d. Uji Auto Korelasi.....	47
5. Analisis Regresi Linear .....	48
6. Uji Kesesuaian.....	50
a. Uji Simultan (F-test).....	50
b. Uji Parsial (t-test).....	51
c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	52
B. Pembahasan Penelitian .....	53

**BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	55
B. Saran .....	55

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**BIODATA**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Menurut Jenis .....	4
Tabel 2.1	Mapping Penelitian Sebelumnya.....	27
Tabel 3.1	Skedul Proses Penelitian .....	30
Tabel 3.2	Devinsis Oprasional .....	32
Tabel 4.1	Realisasi Dana Alokasi Umum Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara(2014-2016) .....	41
Tabel 4.2	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara (2014-2016) .....	42
Tabel 4.3	Realisasi Belanja Daerah Pemerintah/Kota di Provinsi Sumatera Utara (2014-2016).....	49
Tabel 4.4	Statistik Deskriptif .....	42
Tabel 4.5	Uji Multikolinearitas .....	43
Tabel 4.6	Uji Autokorelasi .....	48
Tabel 4.7	Regresi Linier Berganda .....	49
Tabel 4.8	Uji Simultan (F-Test) .....	50
Tabel 4.9	Uji Parsial (t.Test)Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Menurut jenis.....	51
Tabel 4.10	Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	52

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran .....	29
Gambar 4.1	PP Plot Uji Normalitas .....	44
Gambar 4.2	Histogram Uji Normalitas .....	45
Gambar 4.3	Heteroskedastisitas .....	47

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Otonomi daerah atau yang sering disingkat OTDA merupakan bentuk desentralisasi yang lebih konkrit terhadap daerah-daerah yang selama hampir 32 tahun berada pada keadaan sentralisasi dan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah di Indonesia menjadi sebuah langkah riil untuk mewujudkan pembangunan ekonomi di daerah yang diharapkan dapat lebih merata. Prinsip otonomi daerah adalah menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya atau dengan kata lain daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat dan dalam kewenangan ini daerah dapat membuat kebijakan untuk memberi pelayanan, peningkatan keikutsertaan pemberdayaan masyarakat yang tujuan utamanya adalah terjadinya peningkatan pembangunan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat. Demi mewujudkan pembangunan ekonomi di daerah maka daerah otonom diberikan sumber anggaran dana yang terdiri atas penadapatan asli daerah dan dana perimbangan antara pusat dengan daerah.

Pendapatan Asli Daerah atau yang lebih sering disingkat PAD menurut Badrudin (2011:99) adalah “Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan

keleluasan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi” dan pendapatan asli daerah ini bersumber dari penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah selanjutnya sumber pendapatan daerah adalah dana perimbangan antara pusat dan daerah.

Dana perimbangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pembiayaan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang termasuk ke dalam dana perimbangan adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan menurut Djaenuri (2012:103) adalah dana bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah dengan demikian akan terselenggara jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan di seluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat dan merupakan satu kesatuan dengan penerimaan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah

Pelimpahan masalah dan kemiskinan yang selama ini tidak mampu ditangani dan diselesaikan oleh pemerintah pusat. Kewajiban pemerintah pusat dalam negara kesatuan untuk menjamin sumber keuangan untuk membiayai otonomi tersebut. Untuk menjamin sumber keuangan bagi daerah otonom, pemerintah harus menjamin perimbangan keuangan pusat dengan daerah. Perimbangan ini dapat ditempuh melalui salahsatu dari dua metode berikut : pertama, perimbangan keuangan yang ditempuh dengan cara penetapan persentase tertentu bagi daerah otonom dari jenis penerimaan pusat.



Belanja daerah merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah. Apalagi dengan adanya otonomi daerah pemerintah dituntut untuk mengelola keuangan daerah secara baik dan efektif. Fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintahan daerah di Indonesia di bidang keuangan daerah adalah relatif kecilnya peranan (kontribusi) PAD di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan kata lain peranan/kontribusi penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk sumbangan dan bantuan, bagi hasil pajak dan bukan pajak, mendominasi susunan APBD.

Tujuan dari transfer dana perimbangan kepada pemerintah daerah adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik. Adanya transfer dana ini bagi pemerintah daerah merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan kewenangannya, sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan dapat digali melalui sumber pendanaan sendiri yaitu PAD.

Tuntutan transparansi publik, kinerja yang baik dan akuntabilitas begitu sering ditujukan kepada para manajer pemerintah di daerah. Seiring dengan itu semua peraturan pemerintah 105 Tahun 2000 juga mensyaratkan dan pertanggung jawaban keuangan dalam bentuk laporan keuangan yaitu berupa neraca daerah, arus kas, dan realisasi anggaran, bagi kepala daerah hal itu semuanya menuntut kemampuan manajemen daerah untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien dan efektif.

Semakin tinggi derajat kemandirian suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Apabila dipadukan dengan derajat desentralisasi fiskal yang digunakan untuk melihat kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan, maka akan terlihat kinerja keuangan daerah secara utuh. Secara umum, semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif. Dalam hal ini, kinerja keuangan positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah pada daerah tersebut. Dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah, khususnya berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang saat ini merupakan salah satu sumber penerimaan yang menjadi tumpuan daerah karena 90% diantaranya adalah menjadi hak daerah.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah**  
**Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi**  
**Sumatera Utara Tahun 2014-2016**

Tahun	PAD	DAU	Belanja Daerah	Persentase (%)
2014	4.416.811.865	1.349.132.276	7.808.557.310	73.84
2015	4.883.880.619	1.139.261.371	7.959.167.184	75.67
2016	4.954.394.796	1.604.505.673	9.476.423.915	69.21

Sumber: *sumut.bps.go.id*

Tabel 1.1 Menunjukkan PAD, DAU dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara pada tiga Tahun Berturut-turut, Tahun 2014, 2015 dan 2016 PAD, DAU dan Belanja Daerah mengalami peningkatan dan penurunan pada Tahun 2014 PAD lebih meningkat dan DAU menurun di bandingkan dengan

Belanja Daerah yaitu 73,84 % selanjutnya di Tahun 2015 mengalami peningkatan dari Tahun sebelumnya yaitu 75,67% dan pada 2016 mengalami penurunan dari Tahun sebelumnya yaitu 69,21%, sehingga hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah terlalu besar mengeluarkan belanja daerah. Berdasarkan uraian dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengungkapkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada kabupaten/ kota di Provinsi Sumatera Utara.”

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Belanja Daerah pada Tahun 2016 sebesar Rp.9.476.423.915 sehingga hal ini menunjukkan bahwa Pemerintahaaan Kabupaten/Kota terlalu besar mengeluarkan Belanja Daerah.
2. Belanja Daerah dipengaruhi oleh sumber-sumber pendapatan daerah, yang terdiri dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2) Dana Alokasi Umum (DAU), 3) Dana Alokasi Khusus (DAK), 4) Dana Bagi Hasil (DBH), 5) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
3. Pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kurang maksimal dalam meningkatkan alokasi Belanja Daerah.

#### **4. Batasan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas agar dapat terfokus dalam pembahasannya maka penelitian ini dibatasi pada Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Daerah pada Beberapa Kabupaten dan Kota Besar yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 - 2016.

#### **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut :Apakah terdapat pengaruh Parsial dan Simultan DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah ?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh DAU dan PAD secara bersamaan terhadap Belanja Daerah.

##### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

###### **a. Bagi peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan cakrawala berfikir dalam hal pengembangan wawasan dibidang belanja daerah dalam pemerintah daerah serta sebagai ajang ilmiah yang menerapkan berbagai teori yang diperoleh selama perkuliahan dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada.

###### **b. Bagi Pemerintah Daerah**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan dana transfer dari pemerintah pusat dan pendapatan asli daerah secara proporsional dan disajikan secara transparan sehingga dapat terwujud goodgovernance.

c. Bagi Pembaca dan Peneliti Selanjutnya

Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pembaca dalam rangka pemenuhan informasi dan referensi atau bahan kajian dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang belanja daerah di pemerintah daerah.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Universitas Yapis papua Faud, Zakaria yang berjudul “Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan asli Daerah terhadap Belanja Daerah kabupaten/kota di provinsi papua” , sedangkan penelitian ini berjudul “Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah di kabupaten/kota sumatera utara”.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada :

1. Variabel Penelitian :penelitian terdahulu memiliki menggunakan 3 (tiga) variabel bebas (X) yaitu Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah serta 1 (satu) variabel yaitu Belanja Daerah. Sedangkan penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel bebas (X) yaitu Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah dan 1 (satu) variabel (Y) yaitu Belanja Daerah.

2. Waktu Penelitian : penelitian terdahulu dilakukan Tahun 2012, sedangkan penelitian ini Tahun 2019.
3. Lokasi Penelitian : penelitian terdahulu dilakukan di Kabupaten/Kota di provinsi papua sedangkan penelitian ini di lakukan di Kabupaten/Kota Provinsi di Sumatera Utara.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Dana Alokasi Umum**

###### **a. Pengertian Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana Alokasi Umum adalah (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang di alokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keungan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Kang (2012:84), dana alokasi umum (DAU) adalah dana perimbangan dalam rangka untuk pemertaan keungan antar daerah .hal tersebut menjelaskn bahwa dana alokasi umum memiliki jumlah yang sangat signufikan sehingga semua pemerintah daerah menjadikan sebagai sumber penerimaan yang sangat penting dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Oleh karna itu, dana alokai umum sebagai respon pemerintah terhadap aspirasi daerah utuk mendapatkan kontrol yang lebih besar terhadap keuangan negara. Dana alokasi umum tersebut di alokasikan untuk Provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan APBN. Tujuan dana alokasi umum adalah sebagai pemerataan kemampuan keungan antar daerah untuk menandai kebutuhan daerah otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dalam pelaksanaan Dana Alokasi Umum, adapun prinsip-prinsip dasar Dana Alokasi Umum Menurut Nordiawan (2011), adalah :

a. Kecukupan

Sebagai suatu bentuk penerimaan, sistem dana alokasi umum harus memberikan sejumlah dana yang cukup kepada daerah.

b. Netralitas dan Efisiensi

Netral artinya suatu sistem alokasi harus diupayakan sedemikian rupa sehingga efeknya memperbaiki harga relatif dalam perekonomian daerah. Sedangkan efisiensi artinya sistem alokasi dana alokasi umum yang tidak boleh menciptakan distorsi dalam struktur harga input, untuk itu sistem alokasi harus memanfaatkan berbagai jenis instrumen finansial alternatif relevan yang tersedia.

c. Akuntabilitas

Penggunaan dana alokasi umum terhadap dana fiskal sebaiknya di lepas ke daerah, karena peran daerah sangat dominan dalam penentuan arah lokasi, maka peran Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), pers dan masyarakat di daerah yang bersangkutan sangat penting dalam proses penentuan anggaran yang perlu dibiayai oleh dana alokasi umum.

c. Relevansi

Sistem dana alokasi umum yang harus mengacu pada tujuan pemberian alokasi sebagaimana dalam undang-undang. Dana alokasi umum di tunjukkan untuk membiayai sebagian dari beban fungsi yang dijalankan, hal-hal yang merupakan prioritas dan target-target nasional yang harus dicapai.

d. Keadilan

Sistem dana alokasi umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam melaksanakan desentralisasi.

e. Objektivitas dan Transparansi

Sistem alokasi yang baik harus didasarkan pada upaya untuk meminimumkan kemungkinan manipulasi, maka sistem dana alokasi umum harus dibuat sejas mungkin formatnya dan formulanya dibuat setransparan mungkin.

f. Kesederhanaan

Rumus dana alokasi umum tidak boleh terlalu kompleks (harus sederhana), sehingga sulit di mengerti orang. Namun tidak boleh juga terlalu sederhana sehingga menimbulkan perbedaan dan kemungkinan ketidak-adilan.

Dana alokasi umum untuk satu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadaan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan perhitungannya alokasi umumnya ditetapkan sesuai dengan undang-undang.

Jumlah keseluruhan dana alokasi umum ditetapkan dalam APBN, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Jumlah keseluruhan dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam netto yang ditetapkan dalam APBN.
- 2) Proporsi dana alokasi umum antar provinsi dan kabupaten/kota di hitung dari perbandingan antar bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.

- 3) Dana alokasi umum untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum sebagai mana di tetapkan.

Dana alokasi umum suatu daerah dialokasikan berdasarka formula yang terdiri tas celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah. Dimana kabupaten fiskal dan kapasitass fiskal daerah. Dimana kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan derah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum (antara lain kesehatan,pendidikan,infrastruktur dan pengetasan kemiskinan). Sedangkan alokasi dasar adalah pos anggaran untuk membayar gaji pegawai negeri sipil (PNS) di daerah. Prinsip dana alokasi umum adalah bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan kecil anak memperoleh dana alokasi umum yang relatif kecil. Sebaiknya jika suatu daerah potensi fiskalnya kecil sementara kebutuhannya besar, maka daerah tersebut akan menerima alokasi dana alokasi umum yang relatif besar. Formula yang digunakan dalam perhitungan dana alokasi umum sebagai berikut :

$$DAU = CF + AD$$

Keterangan:

DAU= Dana Alokasi Umum

CF =Celah Fiskal (Kebutuhan Fiskal-Kapasitas Fiskal)

AD =Alokasi dasar (Gaji PNS daerah)

Menurut Renyowijoyo (2010) mengatakan bahwa kebutuhan fiskal diartikan sebagai kebutuhan daerah untuk membiayai semua pengeluaran daerah dalam rangka menjalankan fungsi/kewenangan daerah dalam penyediaan

pelayanan publik. Kapasitas fiskal daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk menghimpun pendapatan berdasarkan potensi yang dimilikinya. Dana alokasi umum yang telah ditetapkan pada setiap daerah berdasarkan pertimbangan celah fiskal akan disalurkan dengan pemindah bukuan dari rekening umum pemerintah pusat ke rekening kas pemerintah daerah. Dana alokasi umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan yang belum berkembang dapat diperkecil.

## **2. Pendapatan Asli Daerah**

Pengertian pendapatan asli daerah adalah merupakan pendapatan asli dari daerah yang digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Menurut Djaenuri (2012:88) pendapatan asli daerah adalah "sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Selanjutnya menurut Halim dan Kusufi (2012:96) pendapatan asli daerah adalah "Merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah". Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah bahwa pendapatan asli daerah (PAD) adalah "Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah". Kemudian berdasarkan Undang-Undang no 33 tahun 2014 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah "pendapatan yang diperoleh daerah yang di

pungut berdasarkan peraturan daerah”, selain pengertian menurut undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang pendapatan asli daerah, berikut ini pengertian menurut beberapa ahli:

1) Menurut Mardiansmo (2011:1)

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang di peroleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2) Menurut Badrudin (2011:99)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan pada daerah dalam menggali perdanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

3) Muhtarom, (2015:660)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain-lain yang sah.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat di simpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang dihasilkan dari daerah atas potensi atau sumber yang sah dan dibagi kepada empat komponen yakni pajak daerah, retribusi, laba perusahaan daerah dan lain-lain yang sah.



### **a. Sumber Hukum dan Fungsi Pendapatan Asli Daerah**

Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah adalah merupakan salah satu faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai pembangunan daerah dan Pendapatan Asli Daerah merupakan alat untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, serta untuk mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pemakaian jasa tersebut.

Menurut Damang (dalam Duwila 2017:170) Dengan adanya penggalan dan peningkatan asli daerah diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuan dalam penyelenggaraan urusan daerah dan kebijakan keuangan daerah diharapkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintah dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas

### **b. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan pusat dan daerah bahwa sumber dan pendapatan asli daerah (PAD) adalah sebagai berikut :

### 1) Pajak daerah

Menurut yani (dalam Hanato, 2018 :18) pajak daerah adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh perorangan atas suatu bandan kepada daaerah tanpa adanya imbalan langsung yang didapat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah dan menurut mardiasmo (2011:32) pajak daaerah adalah “pajak yang dipungut oleh darah seperti provinsi,kabupaten maupun kotanya yang berdasarkan peraturan daerah masing-masing dn hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya”.berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 jenis objek pajak daaerah provinsi dan kabupaten/kota dibedakan menjadi:

#### a) Objek pajak daerah provinsi,meliputi :

- (1) Pajak kendaraan bermotor.
- (2) Bea balik nama kendaraan bermotor.
- (3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- (4) Pajak kendaraan di atas air.
- (5) Pajak air di bawah tanah.
- (6) Pajak ari permukaan

#### b) Jenis objek pajak untuk kabupaten/kota sebagai berikut :

- (1) Pajak hotel.
- (2) Pajak restoran.
- (3) Pajak hiburan.
- (4) Pajak reklame.
- (5) Pajak penegaraan jalan.

(6) Pajak pengambilan bahan galian golongan C.

(7) Pajak parkir

2) Retribusi Daerah.

Menurut Darise (2011:136) retribusi daerah adalah “pungutan daerah sebagai bayaran atas jasa atau pemberi izin tertentu yang khusus di sediakan atau di berikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, jenis pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah dibedakan antara menjadi :

a) Jenis retribusi daerah provinsi sebagai berikut:

(1) Retribusi pelayanan kesehatan.

(2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah.

(3) Retribusi penggantian biaya cetak peta.

(4) Retribusi pengujian kapal perikanan

b) Jenis retribusi daerah kabupaten/kota sebagai berikut:

(1) Retribusi pelayanan kesehatan.

(2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

(3) Retribusi penggantian biaya cetak KTP.

(4) Retribusi penggantian penggantian biaya cetak akte ctatan sipil.

(5) Retribusi pelayanan pemakaman.

(6) Retribusi pelayanan penguburan mayat.

(7) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

(8) Retribusi pelayanan pasar.

(9) Retribusi pengujian kendaraan bermotor.

- (10) Retribusi pemeriksa alat pemadam kebakaran.
- (11) Retribusi penggantian biaya cetak peta.
- (12) Retribusi pengujian kapal perikanan.
- (13) Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- (14) Retribusi jasa usaha pasar, grosir atau pertokoan.
- (15) Retribusi jasa usaha tempat pelelangan.
- (16) Retribusi jasa usaha terminal.
- (17) Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir.
- (18) Retribusi jasa usaha tempat penginapan/persinggahan/villa.
- (19) Retribusi jasa usaha penyedotn kaku.
- (20) Retribusi jasa usahabrumah potong hewan.
- (21) Retribusi jasa usaha pelabuhan kapal.
- (22) Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga.
- (23) Retribusi jasa usaha penyebaran di ata air.
- (24) Retribusi Jasa usaha penyebrangan di atas air.
- (25) Retribusi jasa usha penjual produksi usaha daerah.
- (26) Retribusi izin mendirikan bangunan.
- (27) Retribusi izin tempat penjualan minumn beralkohol.
- (28) Retribusi izin gangguan.
- (29) Retribusi proyek.

## 2. Hasil pengelolaann kekayaan milik daerah yang di pisahkan

Menurut Halim dan Kusufi (2012:98) kekayaan daerah yang dipisahkan adalah “kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan Anggaran Pendapatn Asli Daerah yang di maksut

untuk di kuasai dan dipertanggung jawabkan secara mandiri oleh daerah". Menurut Darise (2011:136) Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN.
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok kelompok Berdasarkan hal ini maka perusahaan daerah merupakan salah satu dari pendapatan daerah yang modalnya secara keseluruhan atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan bagi daerah yang mempunyai badan usaha milik daerah (BUMD) seperti perusahaan daerah air minum (PDAM), bank pembangunan daerah (BPD), Badan Kredit Kacamata, pasar dan lain sebagainya merupakan bagian dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan.

### 3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Menurut Halim dan Kusufi (2012:98) lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan penerimaan yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah.

Lain- lain pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang tidak dapat diklasifikaikan dalam pajak daerah , retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan yang termasuk dalam lain-lain pendapatan asli daerah yang sah diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Hasil pengelolaan kekayaan yang tidak di pisahkan.
- b. Jasa giro.

- c. Pendapatan bunga.
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- e. Komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan /atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

### **3. Belanja Daerah**

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 23, belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten atau kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antara pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan Belanja diklasifikasikan sebagai berikut.

- a. Urusan pemerintahan terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Belanja menurut urusan wajib mencakup.
  - 1) Pendidikan.
  - 2) Kesehatan.
  - 3) Pekerjaan umum.
  - 4) Perumahan rakyat.
  - 5) Penataan ruang.
  - 6) Perencanaan pembangunan.



- 7) Perhubungan.
  - 8) Lingkungan hidup.
  - 9) Pertahanan.
  - 10) Kependudukan dan catatan sipil.
  - 11) Pemberdayaan perempuan.
  - 12) Keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
  - 13) Sosial.
  - 14) Tenaga kerja.
  - 15) Koperasi dan usaha kecil dan menengah.
  - 16) Penanaman modal.
  - 17) Kebudayaan.
  - 18) Pemuda dan olahraga.
  - 19) Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
  - 20) Pemerintahan umum.
  - 21) Kepegawaian.
  - 22) Pemerdayaan masyarakat dn desa.
  - 23) Stastik.
  - 24) Arsip,dan
  - 25) Komunikasi dan informasi.
- b. Belanja menurut urusan pilihan mencakup hal-hal sebagai berikut.
- 1) Pertanian.
  - 2) Kehutanan.
  - 3) Energi dan sumber daya mineral.
  - 4) Pariwisata.

- 5) Kelautan dan perikanan.
  - 6) Perdagangan.
  - 7) Trasmigrasi.
- c. Fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari hal-hal sebagai berikut:
- 1) Pelayanan umum.
  - 2) Ketertibaan dan ketentraman
  - 3) Ekonomi.
  - 4) Lingkungan hidup.
  - 5) Perumahan dn fasilitas umum.
  - 6) Kesehatan.
  - 7) Parawisata dan budaya.
  - 8) Pendidikan dan
  - 9) Perlindungan sosial.
- d. Urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja mencakup hal-hal sebagai berikut.
- 1) Belanja tidak langsung, terdiri dari hal-hal berikut ini.
    - a) Belanja pegawai  
Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tujuan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang di tetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
    - b) Bunga  
Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principl outstanding*)

berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang

c) Subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan / lembaga tertentu (perusahaan/ lembaga yang menghasilkan produk/jasa pelayanan umum masyarakat) agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

d) Hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang/jasa kepada pemerintah daerah lainya, dan kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah. Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan dasar umum. Hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/ atau kelompok masyarakat/perorangan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

e) Bantuan sosial

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

f) Belanja bagi hasil

Belanja bgi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pedapatan provinsi kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerinth daerah lainnya sesuai engan ketentuan perundang-undangan.

g) Bantuan keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah desa,dan kepada pemerintah daerah lain atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaanya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerimaan bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan daerah pemberian bantuan.

h) Belanja tidak terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak bisa atau diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosil yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Kegiatan yang bersifat tidak biasa yaitu untuk tanggapan darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelnggaran pemerintah demi terciptanya keamanan,ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.

## 2) Belanja Lansung

Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. kelompok belanja langsung terdiri dari hal-hal berikut ini.

a) Belanja pegawai untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

### b) Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/ atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

### c) Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembagunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

## 4. Pembiayaan Daerah

Menurut permedagri Nomor.13 Tahun 2006 pasal 23, pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Surplus APBN terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah defisit terjadi apabila



anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah.

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA).
- b. Pencairan dan cadangan.
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Penerimaan pinjaman daerah.
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman dan
- f. Penerimaan piutang daerah.

Pengeluaran pembiayaan mencakup:

- a. Pembentukan dana cadangan.
- b. Penerimaan modal (investasi) pemerintah daerah.
- c. Pembayaran pokok utang dan
- d. Pemberian pinjaman daerah.

Secara lebih sederhana, struktur APBN dapat dirinci sebagai berikut ini:

## **B. Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan ini dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Mapping Penelitian Sebelumnya

No	Nama/asal dan tahun	Judul	Variabel X	Variabel y	Model Analisis	Hasil penelitian
1	Faud,zakaria (2017)	Pengaruh Dana Alokasi umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja Daerah (studi Pada anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di provinsi papua)	X1=dana alokasi umum X2=pendapatan asli daerah	Y=belanja daerah	Regresi linier	Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dn signifikan terhadap Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.
2	Anita Lestari (2016)	Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal dan kemandirian keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara	X1=dana alokasi khusus X2=pendapatan asli daerah	Y=belanja modal	Regresi linier berganda	Terdapat pengaruh yang signifikan antara dana alokasi umum terhadap belanja modal. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan asli daerah terhadap belanja modal. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi Umum terhadap kemandirian keuangan daerah. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuanga Derah Terdapat pengaruh yang signifikan antara

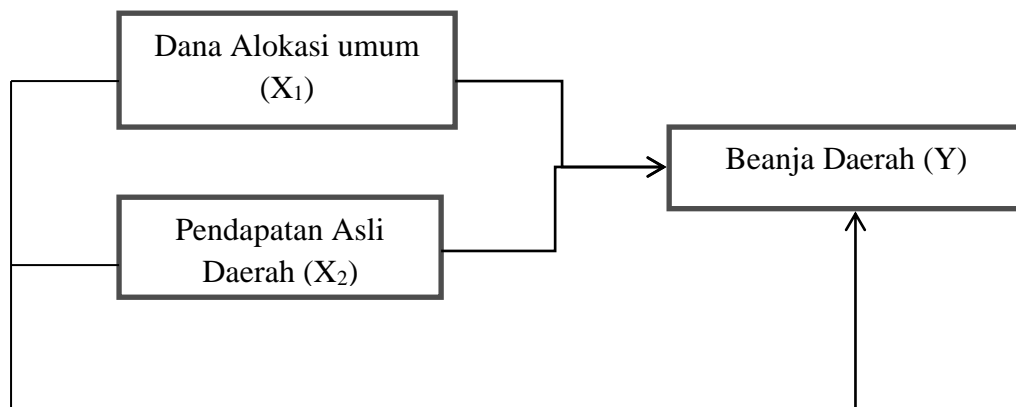
						belanja modal terhadap kemandiriann keuangan daerah.
3	Henri Paulus Gerungan, David Paaul Elia Saerang, Ventje ilat, (2018)	Pengaruh Pendaptan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Moal (studi kasus pada pemerintahan daerah kabupaten dan kota di provinsi sulawesi utara)	X1=pendapatan asli daerah X2=dana alokasi umum X3=dana alokasi khusus	Y=belanja modal	Regresi berganda	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.
4	Panggabean (2014)	Flypaper effect pada unconditional grant dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.	DAU (X <sub>1</sub> ), DBH (X <sub>2</sub> ) dan pendapatan Asli Daerah	Y=Belanja Daerah	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

Sumber : Diolah Penulis, 2019

### C. kerangkaPemikiran

kerangka konsep merupakan suatu hubungan/kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan tentang suatu topik yang akan dibahas.

Berdasarkan uraian diatas, maka disebut kerangkakonseptual penelitian adapun gambar 2.1:



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

### D. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013:96), mengemukakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja daerah pada pemerintah Kabupaten/kota di Sumatera Utara.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang bersifat asosiatif. Menurut Sugiono (2017:8) “penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi/sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

#### B. Tempat dan Waktu Penelitian

##### 1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dengan memperoleh data dari situs web Badan Pusat Statistik Sumatera Utara.

##### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Desember 2018 sampai dengan selesai yang dapat dilihat dengan format sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian**

No	NAMA KEGIATAN	Tahun 2019				
		Januari	Feb-Mei	Jun- Sep	Okt-Nov	Desember
1	Pengajuan Judul					
2	Penyusunan Proposal					
3	Perbaikan / ACC Proposal					
4	Seminar Proposal					
5	Pengolahan data					
6	Penyusunan Skripsi					
7	Bimbingan Skripsi					
8	Sidang Meja Hijau					



## **C. Populasi dan Sampel/Jenis Sumber Data**

### **1. Populasi**

Menurut Sugiyono (2017:117) menyatakan bahwa Populasi adalah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian ini adalah laporan realisasi APBN Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Jumlah populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 33 Kabupaten/Kota

### **2. Sampel**

Menurut Sugiyono (2013;118) menyatakan bahwa Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik dalam pengambilan sampel penelitian menggunakan metode purposive sampling. Menurut Sugiyono (2010) pengertiannya adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representative. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah data DAU, PAD, Belanja Daerah Kabupaten dan Kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara yang meliputi 9 daerah Kabupaten 1 daerah Kota sehingga daerah total populasi adalah 10 data.sampel sebanyak 10 daerah, yaitu : 1) Kabupaten Asahan, 2) Kabupaten Dairi, 3) Deli Serdang, 4) Kabupaten Langkat, 5) Kabupaten Mandailing Natal, 6) Kabupaten Simalungun, 7) Kabupaten Tapanuli Selatan, 8) Kabupaten Tapanuli Utara, 9) Kabupaten Toba Samosir, 10) Kota Medan.

## 2. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang berupa angka-angka yang termuat dalam laporan Realisasi APBD pada kabupaten/kota di Sumatra Utara Tahun Anggaran 2014 sampai 2016 serta data-data yang berhubungan dengan penelitian.

### b. Sumber data

Data penelitian ini diperoleh dari data pusat statistik yaitu ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id).)

## D. Definisi Oprasional

Adapun definisi oprasional dan pengukuran dari variabel independen dan variabel dependen pada penelitian ini, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel yang dibawah ini sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Definisi Oprasional**

Variabel	Indikator	Deskripsi	Skala
Dana Alokasi Khusus	Realisasi Penerimaan Dana Alokasi umum	Dana transfer yang bersifat umum dari pemerintahan pusat ke pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan horizontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan.	Nominal
Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diterima oleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai perundang-undangan. (Undang-Undang No.33	Nominal

		tahun 2004 pasal 6)	
Belanja Daerah	<p>BTL= Belanja pegawai + belanja bunga + belanja subsidi +belanja hibah + belanja sosial +belanja bagi hasil + bantuan keuangan +belanja tak terduga.</p> <p>BL= Belanja Pegawai + belanja barang dan jasa + belanja modal</p>	<p>Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara tidak langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.</p> <p>Belanja langsung merupakan belanja yang merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan pemerintah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.</p>	Nominal

Sumber : Diolah Penulis, 2019

### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan data, mengolah data-data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## **F. Teknik Analisis Data**

### **1. Statistik deskriptif**

Statistik deskriptif merupakan metode untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisa data kuantitatif secara deskriptif. Menurut Sugiyono, (2017), “Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi dari suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varian maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi)”. Berdasarkan data olahan SPSS v 25, maka akan dapat diketahui nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi dari setiap variabel.

### **2. Uji Asumsi Klasik**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik dengan menggunakan persamaan regresi linier berganda dapat disebutkan sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi uji asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik dalam penelitian mencakup uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

#### **a. Uji Normalitas**

Pengujian tahap awal yang dilakukan dalam metode penelitian analisis data. Melalui pengujian ini, dapat diambil tindak lanjut untuk menggunakan statistik parametrik atau tidak. Pengujian ini diperlukan karena untuk melakukan uji t dan uji F yang mengasumsikan bahwa nilai dipenuhi maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Analisis grafik dan analisis statistik digunakan untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak. Normalitas dapat dideteksi dengan

melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dan grafik pada output Normal-p plot atau dengan melihat histogram dari residualnya.

Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

- (1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- (2) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

#### **b. Uji Multikolinearitas**

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi diantara variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen karena akan mengurangi keyakinan dalam pengujian signifikansi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala multikolinearitas didalam model regresi ini dengan melihat nilai *variance inflation factor* (VIF), nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah  $VIF > 10$ , apabila nilai  $VIF < 10$  berarti tidak terjadi multikolinearitas.

#### **c. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke

pengamatan yang lain. Jika variance dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Grafik scatterplot menunjukkan bahwa tidak ada pola yang menjelaskan, serta titik - titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka terjadi heteroskedastisitas.

#### d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Hal ini sering ditemukan pada waktu (*time series*) karena “gangguan” pada seseorang individu/ kelompok yang sama pada periode berikutnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.

Berdasarkan *output* SPSS dibawah ini diketahui bahwa nilai Durbin - Watson. Secara umum biasa diambil patokan :

##### 1. Deteksi Autokorelasi Positif

Jika Angka  $DW < DL$  (Tabel) maka terdapat autokorelasi positif.

Jika Angka  $DW > DU$  (Tabel) maka tidak terdapat autokorelasi positif.

Jika Angka  $DL$  (Tabel)  $< DW < DL$  (Tabel) maka tidak dapat disimpulkan

## 2. Deteksi Autokorelasi Negatif

Jika Angka (4- DW) < DL (Tabel) maka terdapat autokorelasi negatif.

Jika Angka (4-DW) > DU (Tabel) maka tidak terdapat autokorelasi negatif.

Jika Angka DL (Tabel) < (4-DW) < DL (Tabel) maka tidak dapat disimpulkan.

## 3. Analisis Regresi Linier

Analisis data merupakan salah satu tahap dalam kegiatan penelitian yaitu, berupa proses penyusunan dan pengolahan data, untuk menganalisis data yang telah diperoleh dari lapangan untuk memperoleh kesimpulan dan juga tepat sesuai dengan karakteristik data penelitian serta tujuan penelitian. Penelitian ini terdiri dari dua variabel bebas ( *Independent variable* ) dan satu variabel terikat ( *Dependent Variable* ). Maka berdasarkan hal tersebut, digunakan analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Dan pengujian model regresi ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 25.

Perhitungan data dengan menggunakan metode regresi linier berganda tersebut dilakukan dengan mengikuti rumus sebagai berikut

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

Keterangan :

$X_1$  = Dana Alokasi Umum

$X_2$  = Pendapatan Asli Daerah

$Y$  = Belanja Daerah



$a$  = Konstanta

$\beta_1, \beta_2$  = Koefisien regresi linier berganda

$\epsilon$  = faktor pengganggu/ *error term*

#### 4. Uji Kesesuaian

##### a. Uji Parsial (Uji t)

Uji Parsial (Uji t) menunjukkan seberapa jauh variabel bebas yaitu dana alokasi umum, dana pendapatan asli daerah terhadap variabel terikat yaitu belanja daerah untuk mengetahui diterima atau tidaknya hipotesis yang diajukan, dilakukan uji t, dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

##### 1. Pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah

$H_0 : P_1 = 0$ , artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah.

$H_a : P_1 \neq 0$ , artinya terdapat pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah.

Pengujian signifikan dengan kriteria pengambilan keputusan adalah :

Terima  $H_0$  (tolak  $H_a$ ), apabila  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau  $Sig\ t > a\ 5\%$ .

Tolak  $H_0$  (terima  $H_a$ ), apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $Sig\ t < a\ 5\%$ .

##### 2. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah

$H_0 : P_1 = 0$ , artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah.

$H_a : P_1 \neq 0$ , artinya terdapat pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah.

Pengujian signifikan dengan kriteria pengambilan keputusan adalah :

Terima  $H_0$  (tolak  $H_a$ ), apabila  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau  $Sig\ t > a\ 5\%$ .

Tolak  $H_0$  (terima  $H_a$ ), apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $Sig\ t < \alpha\ 5\%$ .

### **b. Uji Simultan (Uji F)**

Pengujian hipotesis secara simultan yaitu pengujian secara serempak atau bersama-sama, dapat diuji dengan menggunakan uji (F-test) bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen ( $X_1$  dan  $X_2$ ) secara bersama – sama terhadap variabel dependen (Y).

Hipotesis untuk pengujian secara simultan adalah:

$H_0 : B_1 = B_2 = 0$ , artinya tidak terdapat pengaruh signifikan secara simultan (dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah).

$H_a : \text{minimal } 1 \neq 0$ , artinya terdapat pengaruh signifikan secara simultan (dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah).

Terima  $H_0$  (tolak  $H_a$ ), apabila  $F_{hitung} < F_{tabel}$  atau  $Sig\ F > \alpha\ 5\%$ .

Tolak  $H_0$  (terima  $H_a$ ), apabila  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau  $Sig\ F < \alpha\ 5\%$ .

### **c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kedekatan hubungan dari model yang dipakai. Koefisien determinasi yaitu angka menunjukkan besarnya kemampuan varian atau penyebaran dari variabel-variabel bebas yang menerangkan variabel tidak bebas atau angka yang menunjukkan seberapa besar variabel tidak bebas dipengaruhi oleh variabel-variabel bebasnya. Besarnya nilai koefisien determinasi adalah antara 0 hingga 1, dimana nilai koefisien mendekati 1, maka model tersebut dikatakan baik karena semakin dekat hubungan antara variabel bebas dengan variabel tidak bebas.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Pemerintahan Sumatera Utara**

Pada zaman pemerintahan Belanda, Sumatera Utara merupakan suatu pemerintahan yang bernama *gouvernement van sumatra* dengan wilayah meliputi seluruh pulau sumatera, dipimpin oleh seorang gubernur yang berkedudukan di kota medan. Setelah kemerdekaan, dalam sidang pertama Komite Nasional Daerah (KND), Provinsi Sumatera kemudian dibagi menjadi tiga sub provinsi yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Utara sendiri merupakan penggabungan dari tiga administrasi yang disebut keresidenan yaitu: keresidenan aceh, Keresidenan Sumatera timur, dan Keresidenan Tapanuli. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1948 pada tanggal 15 April 1948, ditetapkannya bahwa sumatera dibagi menjadi tiga provinsi yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu: provinsi sumatera utara, provinsi sumatera tengah, dan provinsi sumatera selatan. Tanggal 15 April 1948 selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Sumatera Utara.

Pada awal tahun 1949, dilakukan kembali reorganisasi pemerintah di sumatera. Dengan keputusan pemerintah darurat R . I. Nomor 22/Pem/PDRI pada tanggal 17 Mei 1949, jabatan gubernur sumatera utara ditiadakan.

Selanjutnya dengan ketetapan pemerintah darurat R.I pada tanggal 17 Desember 1949, dibentuk provinsi aceh dan provinsi tapanuli/ sumatera timur. Kemudian

dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950, ketetapan tersebut dicabut dan dibentuk kembali Provinsi Sumatera Utara. Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956, dibentuk Daerah Otonom Provinsi Aceh, sehingga wilayah Provinsi Sumatera Utara sebagian menjadi wilayah provinsi aceh.

## 2. Deskripsi Variabel

Berikut ini adalah deskripsi variabel penelitian dana alokasi umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Daerah.

**Tabel 4.1**  
**Realisasi Dana Alokasi Umum Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran (2014 - 2016)**

No	Pemerintahan	Tahun		
		2014	2015	2016
1	Kab. Asahan	795.350.930	817.746.952	891.149.688
2	Kab. Dairi	532.723.259	560.602.194	623.702.235
3	Kab. Deli Serdang	1.363.811.250	1.396.297.620	1.494.821.153
4	Kab. Langkat	1.039.650.946	1.099.486.754	1.200.481.463
5	Kab. Mandailing natal	692.133.576	722.942.098	788.477.434
6	Kab. Simalungun	1.077.986.764	1.084.973.726	1.230.816.187
7	Kab. Tapanuli Selatan	572.097.968	592.764.058	654.669.272
8	Kab. Tapanuli Utara	596.841.256	616.216.474	650.827.006
9	Kab. Toba Samosir	495.377.257	506.843.572	171.553.711
10	Kota Medan	1.393.504.580	1.232.071.365	1.611.940.995

Sumber: *bps.co.id*

Pada tabel 4.1 di atas diketahui dari variabel Dana Alokasi Umum nilai minimum pada Kabupaten Toba Samosir tahun 2014 sebesar 495.377.257 dan nilai maksimum pada Kota Medan tahun 2016 sebesar 1.611.940.995.

**Tabel 4.2**  
**Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Di**  
**Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran (2014 - 2016)**

No	Pemerintahan	Tahun		
		2014	2015	2016
1	Kab. Asahan	91.468.219	98.279.308	119.498.541
2	Kab. Dairi	53.525.854	58.791.848	68.003.242
3	Kab. Deli Serdang	433.885.507	515.293.681	573.010.351
4	Kab. Langkat	107.811.975	122.715.360	132.673.213
5	Kab. Mandailing natal	44.119.212	63.874.458	70.405.902
6	Kab. Simalungun	96.390.209	111.893.283	132.560.801
7	Kab. Tapanuli Selatan	95.588.202	109.349.452	76.640.676
8	Kab. Tapanuli Utara	63.696.097	82.861.214	94.783.155
9	Kab. Toba Samosir	25.924.591	30.986.265	54.391.304
10	Kota Medan	1.515.685.947	1.489.723.189	1.535.435.344

Sumber: bps.co.id

Pada tabel 4.2 di atas diketahui dari variabel Pendapatan Asli Daerah nilai minimum pada Kabupaten Toba Samosir tahun 2014 sebesar 25.924.591 dan nilai maksimum pada Kota Medan tahun 2016 sebesar 1.535.435.344.

**Tabel 4.3**  
**Realisasi Belanja Daerah Pemerintah/Kota Di Provinsi Sumatera Utara**  
**Tahun Anggaran (2014 - 2016)**

No	Pemerintahan	Tahun		
		2014	2015	2016
1	Kab. Asahan	1.388.135.949	1.395.720.715	1.501.954.701
2	Kab. Dairi	746.087.911	867.993.509.	993.346.050
3	Kab. Deli Serdang	2.392.252.735	2.735.624.355	3.005.435.387
4	Kab. Langkat	1.605.301.211	1.934.943.728	2.287.199.857
5	Kab. Mandailing natal	975.996.202	1.245.111.642	1.459.576.624
6	Kab. Simalungun	1.648.278.603	1.824.943.466	2.185.034.609
7	Kab. Tapanuli Selatan	862.248.440	1.119.177.035	1.176.894.126
8	Kab. Tapanuli Utara	816.709.178	1.097.187.075	1.251.194.184
9	Kab. Toba Samosir	770.864.744	847.211.033	1.010.631.911
10	Kota Medan	4.366.467.365	4.374.968.274	4.525.231.332

Sumber: bps.co.id

Pada tabel 4.3 di atas diketahui dari variabel Pendapatan Asli Daerah nilai minimum pada Kabupaten Dairi tahun 2014 sebesar 746.087.911 dan nilai maksimum pada Kota Medan tahun 2016 sebesar 4.525.231.332.

### 3. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang mendeskripsikan karakteristik dari data-data yang digunakan dalam penelitian, mulai dari nilai minimum, maksimum, rata-rata, standar deviasi, dan variance yang akan dijelaskan pada tabel 4.4.

**Tabel 4.4 Statistik Deskriptif**

<b>Descriptive Statistics</b>			
	Mean	Std. Deviation	N
Belanja Daerah	1747957398.37	1081101734.470	30
Dana Alokasi Umum	883595393.43	360532912.792	30
Pendapatan Asli Daerah	266658752.43	443251037.598	30

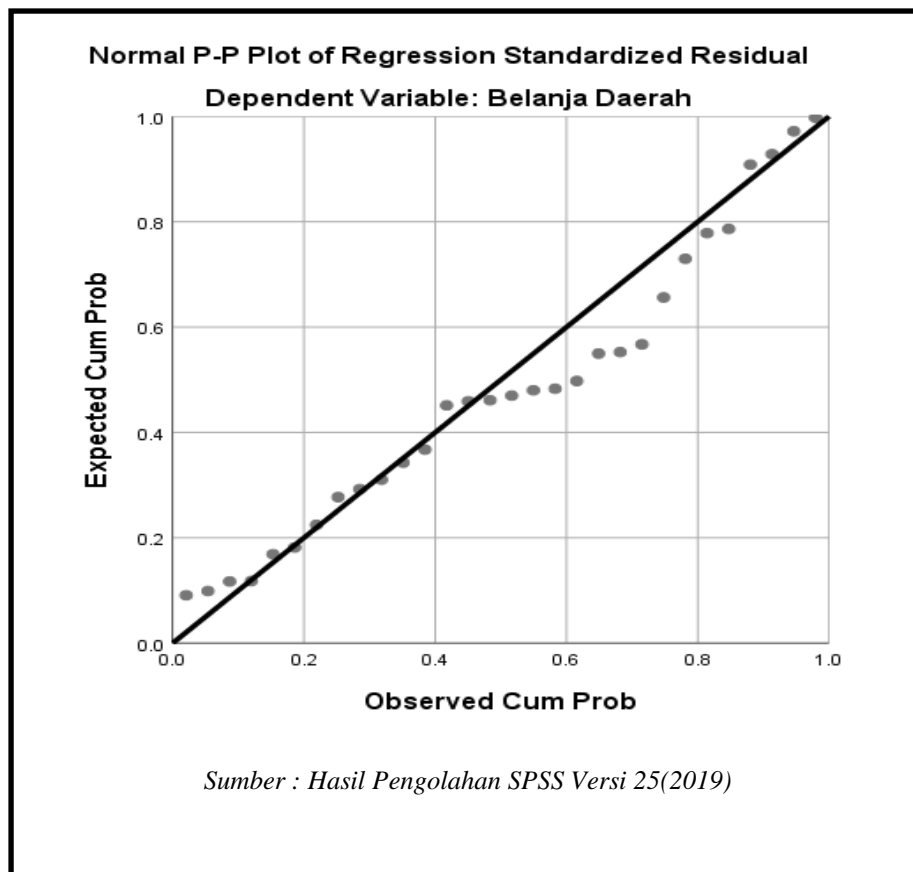
*Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 25 (2019)*

## 4. Pengujian Asumsi Klasik

### a. Uji Normalitas Data

Pengujian tahap awal yang dilakukan dalam metode penelitian analisis data. Melalui pengujian ini, dapat diambil tindakan lanjut untuk menggunakan statistik parametrik atau tidak. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian ini adalah yang memiliki distribusi normal.

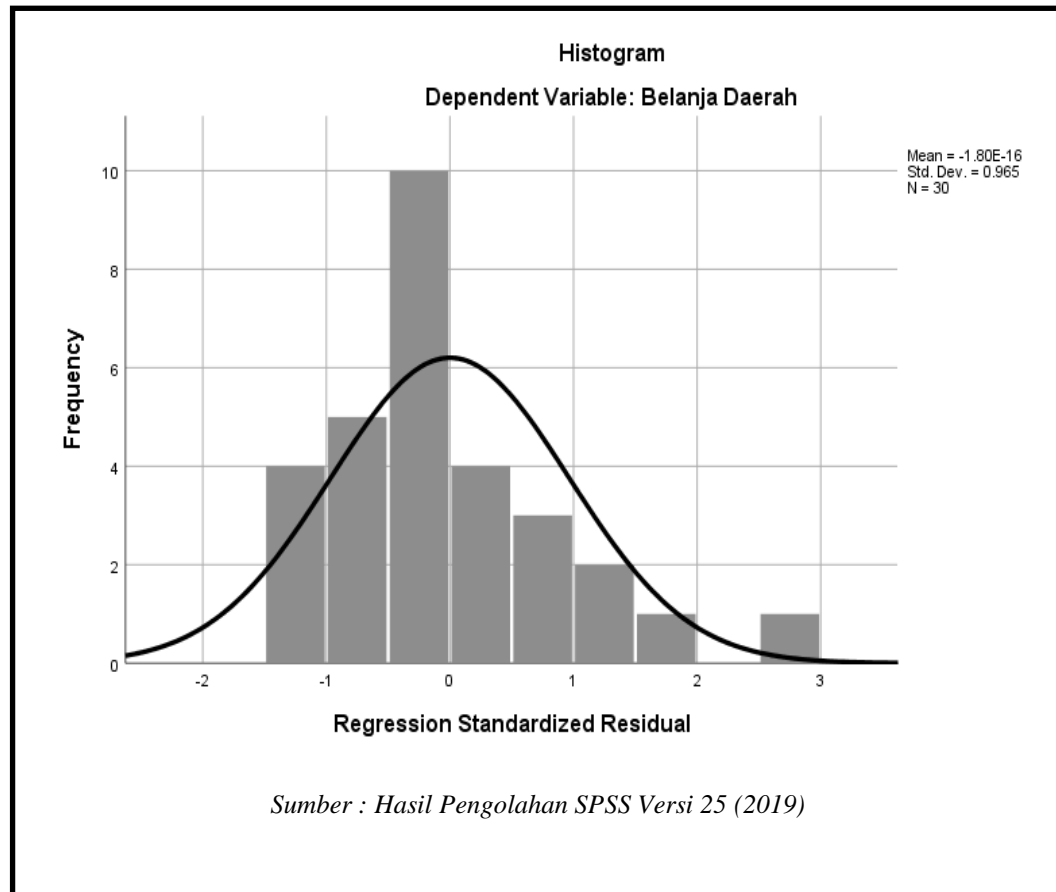
Analisis grafik dan analisis statistik digunakan untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak. Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal.



**Gambar 4.1 PP Plot Uji Normalitas**

Grafik normal *probability plot* menggambarkan titik-titik yang menyebar mendekati garis diagonal, sehingga data dikatakan normal. Grafik normal *probability plot* terlihat titik-titik menyebar disekitar/mengikuti garis diagonal dan membentuk huruf S, yang menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, kesimpulannya bahwa data yang disajikan dapat dikatakan normal.





**Gambar 4.2 Histogram Uji Normalitas**

Berdasarkan gambar 4.2 diatas dengan melihat tampilan histogram uji normalitas di atas, dapat disimpulkan bahwa histogram menunjukkan pola distribusi normal.

#### **b. Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat korelasi antar variable bebas(independent). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variable bebas (tidak terjadi Multikolinearitas).Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan dengan melihat VIF antara variabel independent. Jika VIF menunjukkan angka  $>10$  dan

$Tolerance < 0,10$  menandakan terdapat gejala multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat di table 4.5.

**Tabel 4.5 Uji Multikolinieritas**

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Dana Alokasi Umum	0.556	1.800
Pendapatan Asli Daerah	0.556	1.800

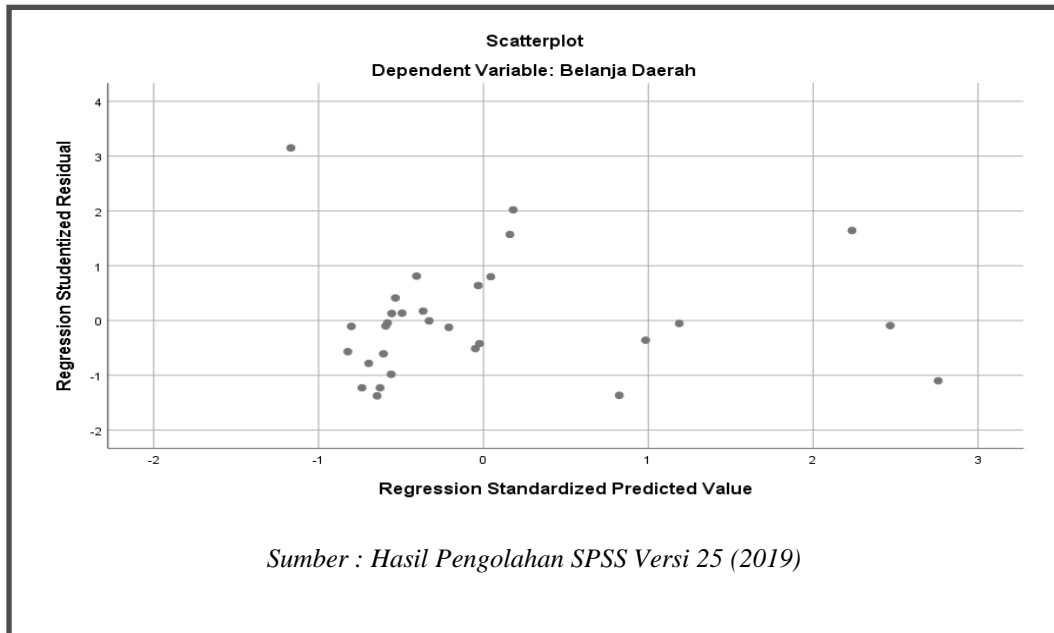
a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 25 (2019)

Dari tabel 4.5 dapat dilihat bahwa semua variabel bebas tidak terkena masalah multikolinieritas. Hal ini dapat dilihat dari nilai  $VIF < 10$  dan  $Tolerance > 0,10$ . Untuk variabel DAU memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,556 dan VIF sebesar 1,800. Variabel PAD memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,556 dan VIF sebesar 1,800.

### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat ketidaksamaan pengganggu antara satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Hasil uji heteroskedastisitas ditampilkan dalam grafik *scatterplot* gambar 4.3.



**Gambar 4.3 Heteroskedastisitas**

Hasil uji grafik *Scatterplot* menunjukkan tidak ada terjadinya gejala heteroskedastisitas pada model regresi, hal ini terlihat dari titik–titik yang menyebar tidak beraturan atau secara acak yang kemudian terdapat diatas maupun dibawah 0 pada sumbu Y.

#### **d. Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi menguji apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode dengan kesalahan pada periode (t-1) sebelumnya, jika terjadi korelasi maka dimana ada masalah autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada table 4.6

Tabel 4.6 Uji Autokorelasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.987 <sup>a</sup>	0.974	0.972	181886629	2.076

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum  
b. Dependent Variable: Belanja Daerah

Berdasarkan *output* SPSS dibawah ini diketahui bahwa nilai Durbin–Watson.

Secara umum biasa diambil patokan :

1. Deteksi Autokorelasi Positif

Angka 2.076 (DW) > 1.567 (pada tabel Durbin-watson) maka tidak terdapat autokorelasi positif.

2. Deteksi Autokorelasi Negatif

Angka 1.924 (4 – DW) > 1.284 (di pada tabel Durbin-watson) maka tidak terdapat autokorelasi negatif.

## 5. Analisis Regresi Linier

Penelitian ini menggunakan analisis linier berganda untuk pengujian statistiknya. Penelitian akan menyajikan model persamaan regresi berganda.

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

Tabel 4.7 Regresi Linier Berganda

Coefficients <sup>a</sup>		
Unstandardized Coefficients		
Model	B	Std. Error
1 (Constant)	196355281.295	100714046.938
Dana Alokasi Umum	1.277	0.126
Pendapatan Asli Daerah	1.586	0.102

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 25 (2019)

Tabel 4.7 pada kolom *unstandardized coefficients* beta dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 196355281.295 + 1.277 X_1 + 1.586 X_2$$

Model interpretasi dari persamaan regresi linier berganda adalah:

- Adanya nilai konstan ini menunjukkan bahwa dengan adanya variabel-variabel bebas DAU dan PAD maka variable terikat Belanja Daerah meningkat 196.355.281,295.
- Jika terjadi peningkatan DAU sebesar 1 juta, maka belanja modal (Y) akan meningkat sebesar 1.277 juta.
- Jika terjadi peningkatan PAD sebesar 1 juta, maka belanja modal (Y) akan meningkat sebesar 1.568 juta.

## 6. Uji Kesesuaian

### a. Uji Simultan (F-test)

Uji (F-test) pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama (serempak) terhadap variabel dependen atau terikat. Uji F bertujuan untuk menguji pengaruh DAU dan PAD secara simultan terhadap Belanja Daerah yang dapat dilihat pada tabel 4.7.

**Tabel 4.8 Uji Simultan (F-Test)**

		ANOVA <sup>a</sup>				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3300141371335	2	1650070685667	498.771	.00
		4654000.000		7327000.000		
	Residual	8932341346069	27	3308274572618		
		42210.000		3044.000		
Total		3389464784796	29			
		1596000.000				

a. Dependent Variable: Belanja Daerah  
b. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum

*Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 25 (2019)*

Berdasarkan tabel 4.7 perhitungan uji Simultan (F-test) dapat diketahui bahwa nilai  $F_{hitung}$  adalah  $498.771 > F_{tabel} 3.340$ , dengan signifikansi 0.00 yang lebih kecil dari 0.05 ( $0.00 < 0.05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu DAU ( $X_1$ ) dan PAD ( $X_2$ ) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (Y).

### b. Uji Signifikan Parsial (uji t)

Uji parsial (t-test) pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual (masing-masing) dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh DAU secara parsial terhadap Belanja Daerah dan PAD secara parsial terhadap Belanja Daerah yang dapat dilihat pada tabel 4.8.

**Tabel 4.9 Uji Parsial (t)**

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	196355281.295	100714046.938		1.950	0.062
Dana Alokasi Umum	1.277	0.126	0.426	10.163	0.000
Pendapatan Asli Daerah	1.586	0.102	0.650	15.513	0.000

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 25 (2019)

Berdasarkan tabel 4.8 hasil uji parsial (t) di atas berikut ini:

- 1) Kemandirian DAU ( $X_1$ ) berpengaruh terhadap belanja modal (Y).

Hipotesis pertama mengenai variabel DAU ( $X_1$ ) diketahui bahwa  $t_{hitung} 10.163 > t_{tabel} 2.051$  dan nilai signifikansi variabel DAU ( $X_1$ ) adalah 0.000 dimana nilai ini lebih kecil dari 0.05 ( $0.00 < 0.05$ ), hal ini berarti DAU ( $X_1$ ) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (Y).

- 2) Kemandirian PAD ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap Belanja Daerah (Y).

Hipotesis pertama mengenai variabel PAD ( $X_2$ ) diketahui bahwa  $t_{hitung} 15.513 > t_{tabel} 2.051$  dan nilai signifikansi variabel PAD ( $X_2$ ) adalah

0.000 dimana nilai ini lebih kecil dari 0.05 ( $0.000 < 0.05$ ), hal ini berarti PAD ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (Y).

### c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel belanja daerah. Nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1. Pada penelitian ini digunakan *Adjusted R Square*, karena variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari satu. Hasil koefisien determinasi dapat dilihat dalam tabel 4.9 sebagai berikut:

**Tabel 4.10 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

$R^2$ )				
Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.987 <sup>a</sup>	0.974	0.972	181886628.8

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum

b. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 25 (2019)

Dari tabel 4.9 koefisien determinasi di atas, dapat dilihat bahwa nilai (*Adjusted R Square*) sebesar 0.972. Hasil perhitungan statistik ini berarti bahwa kemampuan DAU dan PAD sebagai variabel independen (bebas) dalam menerangkan variasi perubahan Belanja Daerah sebagai variabel dependen (terikat) sebesar 97.2%, sedangkan sisanya sebesar 2.8% ( $100\% - 97.2\%$ ) diterangkan oleh faktor-faktor lain di luar model regresi yang dianalisis.



## **B. Pembahasan Penelitian**

Daerah otonomi adalah daerah yang diberikan wewenang oleh pemerintahan pusat untuk mengatur daerah dan keuangan sendiri, artinya daerah harus mampu menggali sumber-sumber penerimaan dengan didukung oleh perimbangan pusat sebagai sumber pemerintah guna memenuhi kebutuhan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat mandiri dalam mengatur rumah tangganya dengan berbagai strategi termasuk perencanaan belanja yang baik, yang berdaya guna tepat sasaran.

Otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memiliki tujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah sehingga daerah bebas untuk mengatur wilayahnya tanpa ada campur tangan pusat. Hal tersebut dilakukan untuk menjangkau wilayah-wilayah yang tidak dapat dijangkau oleh pemerintah pusat. Dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 diterangkan bahwa untuk melancarkan pelaksanaan untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan dari analisis data dan pengujian yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah. Tujuan dana transfer adalah untuk mengurangi kesenjangan keuangan dan untuk menciptakan stabilisasi aktifitas perekonomian di daerah. Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan

pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan pada hal tersebut, sangat jelas terlihat bahwa Pemerintah Kota/Kabupaten Di Sumatera Utara masih mengalami ketergantungan keuangan pada pemerintah pusat.

Berdasarkan penganalisaan data, diperoleh hasil bahwa variabel pendapatan asli daerah pada penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faud, zakaria (2017) yang mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Sedangkan hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa pendapatan dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, dengan nilai koefisien determinasi sebesar 76.2% , sedangkan sisanya 2.8% (100% - 97.2%) diterangkan oleh faktor-faktor lain di luar model regresi yang dianalisis.

Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah adalah indikator nyata bagi pemerintahan kabupaten/kota untuk lebih mengoptimalkan dalam memperoleh pendapatan asli daerah, karena jika PAD mengalami peningkatan maka pemerintahan kabupaten/kota akan dapat memenuhi kebutuhan belanja daerahnya.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan dari penelitian mengenai pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2014 sampai dengan 2016 sebagai berikut :

1. Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Sedangkan secara simultan Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Sumatera Utara.
2. Pengujian Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan bahwa hasil sebesar 0.972 yang berarti Belanja Daerah dapat dijelaskan oleh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah sebesar 97.2%. sedangkan sisanya 2.8% (100% - 97.2%) belanja daerah yang diterangkan oleh faktor-faktor lain di luar model regresi yang dianalisis

#### **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penganalisaan data serta beberapa kesimpulan yang telah dibuat, maka peneliti dapat memberikan saran-saran yang sekiranya bisa dipertimbangkan, Saran yang penulis berikan antara lain :

1. Bagi Pemerintahan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara untuk dapat meningkatkan dan menggali potensi-potensi yang dapat menambah Dana Alokasi Umum dan pendapatan asli daerah serta dengan membangun badan usaha yang bersetatus kepemilikan pemerintahan daerah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan guna memenuhi belanja daerah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Selain itu juga, pemerintah harus lebih propisional dan lebih berhati-hati dalam mengalokasikannya, karena dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat akan mempertanggungjawabkan kembali kepada pemerintah pusat, kepada masyarakat dan juga DPRD guna mengetahui apakah daa tersebut telah digunakan untuk peningkatan kesejahteraan, pelayanan dan kemakmuran seluruh masyarakat.
2. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk memperbanyak sensus/sampel yang digunakan dari populasi yang dipilih agar hasil selain kabupaten dan kota yang ada di kota Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini yang menguji belanja daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara dengan sampel 10 Kabupaten/Kota selama 3 tahun yaitu dari tahun 2014 sampai dengan 2016 . sehingga variabel yang digunakan dalam penelitian akan datang diharapkan lebih bervariasi dan lebih luas dengan menambah variabel bebas atau variabel terikat lainnya baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan pemerintahan Daerah lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- liah, N. (2020). *The Role Of E-Filing In Improving Taxpayer Compliance In Indonesia. Accounting and Business Journal*, 2(1), 1-9.
- Arnita, V. (2018). Pengaruh Orangtua Terhadap Mahasiswa Akuntansi Dalam Pemilihan Karir Menjadi Profesi Akuntan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 4(2), 19-23.
- Badrudin, Rudi. (2011) *Ekonomi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UUP STIM YKPN Yogyakarta.
- Barus, M. D. B., & Hakim, A. (2020). Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika melalui Metode *Practice Rehearsal Pairs* pada Siswa SMA Al-Hidayah Medan. *Biormatika: Jurnal ilmiah fakultas keguruan dan ilmu pendidikan*, 6(1), 74-78.
- Chrisna, H. (2018). Analisis Manajemen Persediaan Dalam Memaksimalkan Pengendalian Internal Persediaan Pada Pabrik Sepatu Ferradini Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 82-92.
- Chrisna, H., Karin, A., & Hasibuan, H. A. (2020). Analisis Sistem Dan Prosedur Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Dengan Akad Pembiayaan Murabahah Pada PT. BANK BRI Syariah Cabang Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(1), 156-166.
- Darise, Nurlan. (2011). *Pengelola Keuangan Daerah*. Jakarta: Indeks
- Djaenuri, Aries (2012). *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Duwila, Kalangi & Kawung.(2017). Tinjauan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Alokasi Umum dan Pengalokasian Anggaran belanja Modal di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Barkala Ilmiah Efesiensi*.
- Fadly, Y. (2011). *An Analysis Of Main Character Conflicts In M.J. Hyland's Carry Me Down*.
- Halim, A, & Kusufi, S. (2012) *Akuntansi Sektor Publik: teori konsep dan aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.

- Hananto, Fian, Dwi. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung (2012-2016). Yogyakarta: UII.
- Hernawaty, H., Chrisna, H., & Noviani, N. (2020). Transaksi Valas Dalam Perspektif Konvensional Dan Syariah. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(1), 1-17.
- Kang, Younguck And Dhani Setyawan. 2012. Intergovernmental Transfer And The Flypaper Effect: Evidence From Municipalities/Regencies In Indonesia. Kdi School. Working Paper.
- Malikhah, I. (2019). Pengaruh Mutu Pelayanan, Pemahaman Sistem Operasional Prosedur Dan Sarana Pendukung Terhadap Kepuasan Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi. *JUMANT*, 11(1), 67-80.
- Mardiasmo. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Muhtarom. Abid. (2015). Analisis PAD Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamongan Periode 2010-2015. *Jurnal Ekbis*. Nordiawan, Deddi. 2011. *Akuntansi Pemerintahan, Selemba Empat*.
- Nasution, A. P. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa di Kecamatan Munte Kabupaten Karo.
- Nasution, D. A. D., & Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Implementasi *E-Budgeting* Terhadap Transparansi Keuangan Daerah Di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 669-693.
- Nasution, N. A., & Sari, W. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan (*Firm Size*) Dan Profitabilitas Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(1), 76-83.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Renyowijoyo, Muindro, 2010. *Akuntansi Sektor Publik : Organisasi Non Laba*, Edisi 2, Mitra Wacana Media.

- Saraswati, D. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Perimbangan sebagai Pemoderasi di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 54-68.
- Saraswati, D. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 110-120.
- Sari, A. K., Saputra, H., & Siahaan, A. P. U. (2017). *Effect of Fiscal Independence and Local Revenue Against Human Development Index. Int. J. Bus. Manag. Invent*, 6(7), 62-65.
- Sari, M. N. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Underpricing Saham pada Saat Initial Public Offering di Bursa Efek Indonesia.
- Setiawan, Anjar. 2010. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Provinsi Jawa Tengah). Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro Semarang.
- Siregar, O. K. (2019). Pengaruh *Deviden Yield* Dan *Price Earning Ratio* Terhadap Return Saham Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 Sub Sektor Industri Otomotif. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 60-77.
- Sugiyono. 2013 . *Pengertian Hipotesis*. Alfabeta,Bandung.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Manajemen*. Alfabeta, Bandung.
- Supraja, G. (2019). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Dan Efektivitas Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 115-130.
- Yunus, R. N. (2019). Kemampuan Menulis Argumentasi Dalam Latar Belakang Skripsi Mahasiswa Manajemen Universitas Pembangunan Panca Budi. *Jumant*, 11(1), 207-216.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan  
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  
[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id).

[www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id).